



Peningkatan Peran JDIH Desa Dalam pemberian Layanan Publik Digital yang Responsif

JDIH BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengelola JDIH Kab. Batang
Desa Beji, Kec Tulis, 20 November 2023

SELAMAT JDIH KAB BATANG



www.jdihn.go.id

1 DASAR HUKUM JDIH

2 KEBIJAKAN NASIONAL JDIH

3 URGENSITAS JDIH

4 KEBIJAKAN JDIH PROV JATENG

**5 PENGELOLAAN JDIH DALAM
MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK**

1. DASAR HUKUM JDIH



DASAR HUKUM PENGELOLAAN JDIH

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | UU Nomor 14 Tahun 2008 | tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 2. | UU Nomor 12 Tahun 2011 | tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |
| 3. | Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 | tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional |
| 4. | Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 | tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah |
| 5. | Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 | Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum |
| 6. | Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 | Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah |
| 7. | Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 | Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah |

2. KEBIJAKAN NASIONAL JDIH



Indonesia Negara Hukum

(UUD Ps. 1 ayat 3)

Pembangunan hukum nasional menghasilkan puluhan ribu peraturan per-uu

Konsekuensi

MASALAH REGULASI:

- *hyper-regulation;*
- *Overlapping;*
- *Inconsistency;*
- Multitafsir;
- *High Cost Economy*
- *Tidak efektif*

TUJUAN

SUPREMASI HUKUM
(MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR)
semua aktivitas dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
harus berdasarkan hukum

Kebijakan

REFORMASI HUKUM
Jilid II
Agenda Penataan Regulasi

Latar belakang

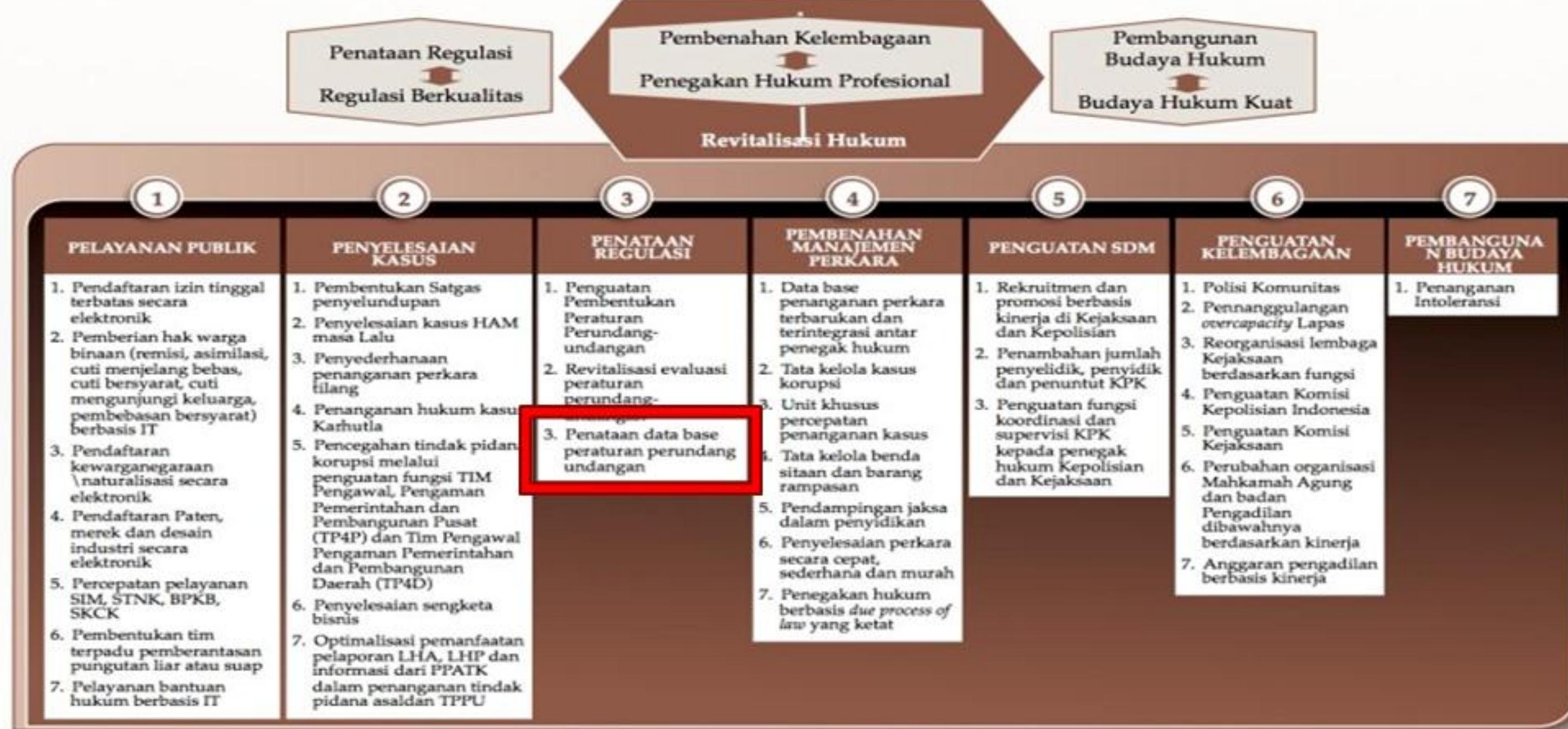
Revitalisasi dan Reformasi Hukum berdasarkan Nawacita

Program revitalisasi hukum menjadi agenda strategis berikut dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

POIN 1: Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

Pemulihan Kepercayaan Publik Keadilan dan Kepastian Hukum

POIN 4: Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya



Agenda Penataan Regulasi

1



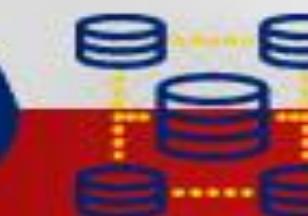
Penguatan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

2



Evaluasi Seluruh Peraturan
Perundang-undangan

3



Pembuatan Database Peraturan
Perundang-undangan yang Terintegrasi

J D I H N



Tugas besar dan tanggung jawab semua Kementerian, Lembaga Non
Kementerian dan Pemerintah Daerah.

AGENDA 2: DATA BASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERINTEGRASI



Sumber : Bappenas RI



ORGANISASI JDIHN



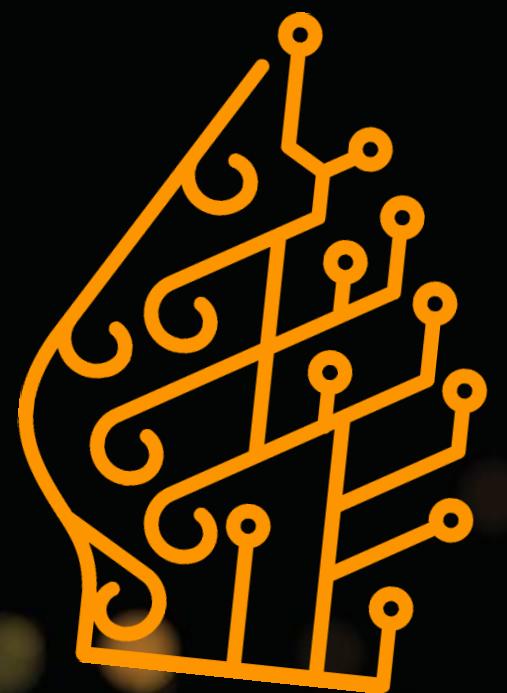
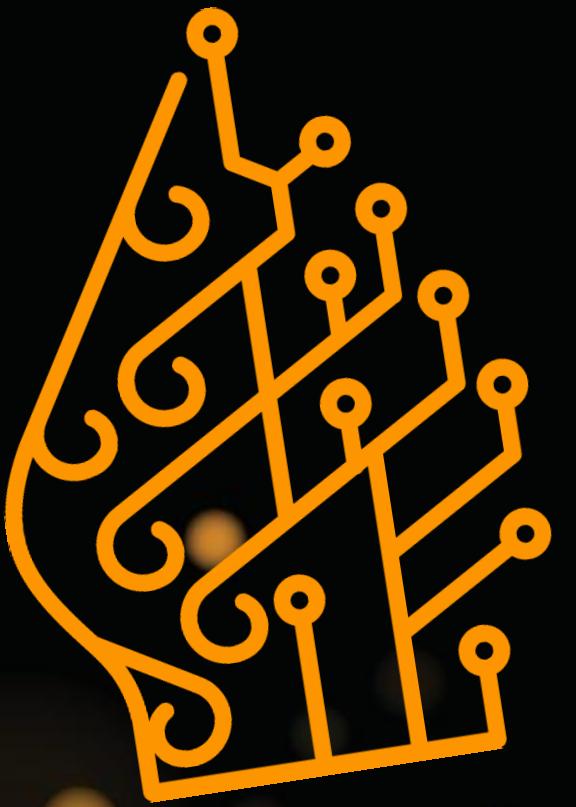
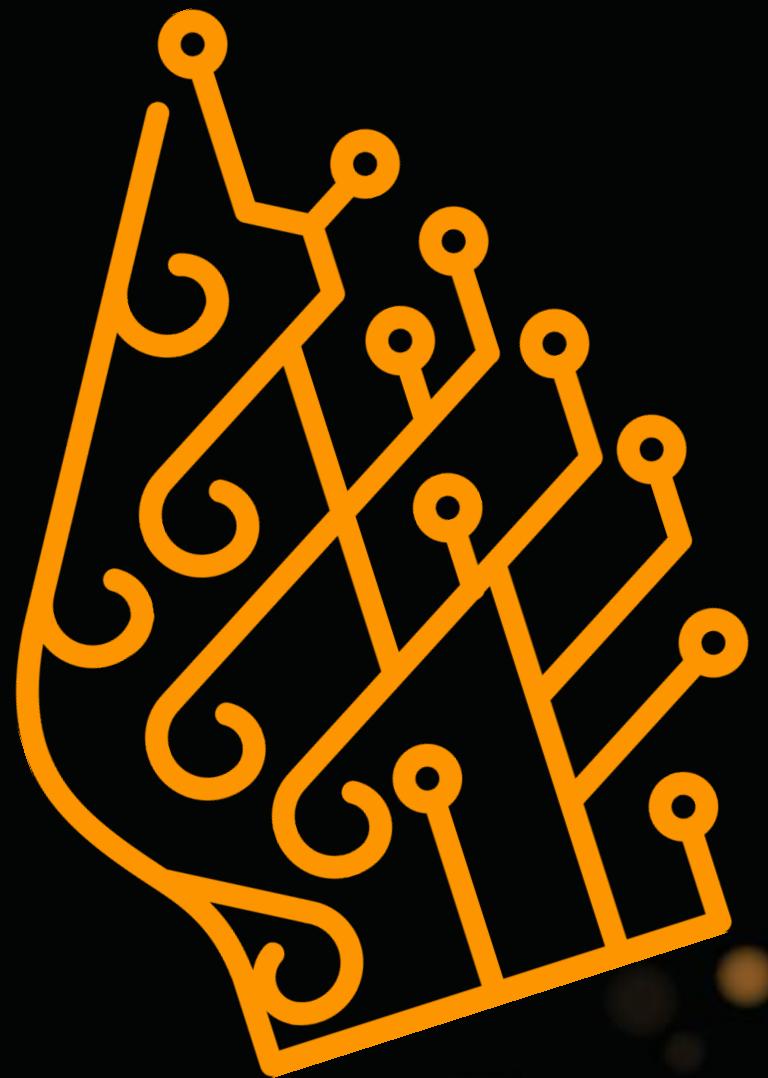
PUSAT JDIHN



ANGGOTA JDIHN

- Kementerian Negara
- Sekretariat Lembaga Negara
- Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Kabupaten/Kota
- DPRD Provinsi Dan Kab/Kota
- Perpustakaan Hukum Pada PTN dan PTS
- Lembaga lain yg ditetapkan oleh Menteri

3. URGENSITAS JDIH





Mencari dokumen hukum ?

Google



HUKUM
ONLINE
.COM

peraturan.go.id

eCLIS!.id

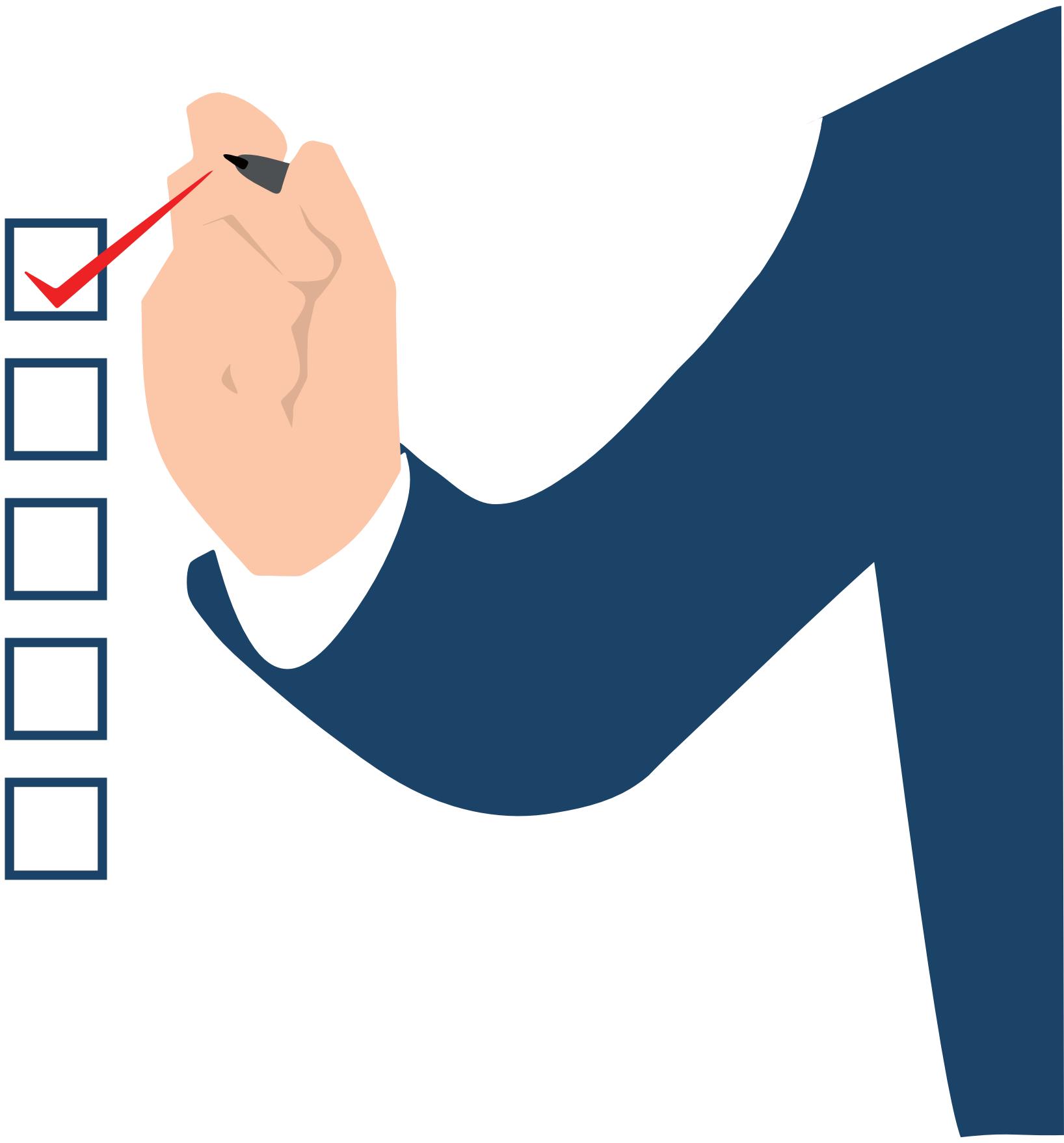


WIKIPEDIA



TUJUAN JDIHN

- ✓ Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasikan di berbagai instansi pemerintah
- ✓ Menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap.
- ✓ Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta sesama anggota jaringan guna penyediaan dokumen dan informasi hukum.



JDIH DALAM PENILAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



SPBE

indikator ke 44
“Tingkat Kematangan
JDIH”

Peraturan Menpan RB
Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan
Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik



INDEKS REFORMASI HUKUM

Indikator
**“Penataan Database
Peraturan Perundang-
Undangan**

Peraturan Menteri Hukum HAM
Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Penilaian Indeks Reformasi Hukum
pada Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah



Satu Data Indonesia

**Mendukung
Intergasi Satu
Data Indonesia**

Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data
Indonesia

4. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JDIH PROVINSI JAWA TENGAH MENUJU SATU DATA HUKUM NASIONAL



Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah

BAGAN STRUKTU JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH



Tugas Pusat JDIH Provinsi

1

pengelolaan dokumentasi
dan informasi hukum.

2

pelayanan hukum berbasis
elektronik terintegrasi

3

pembinaan, pengembangan,
pemantauan, dan evaluasi kepada
anggota JDIH di wilayah Provinsi

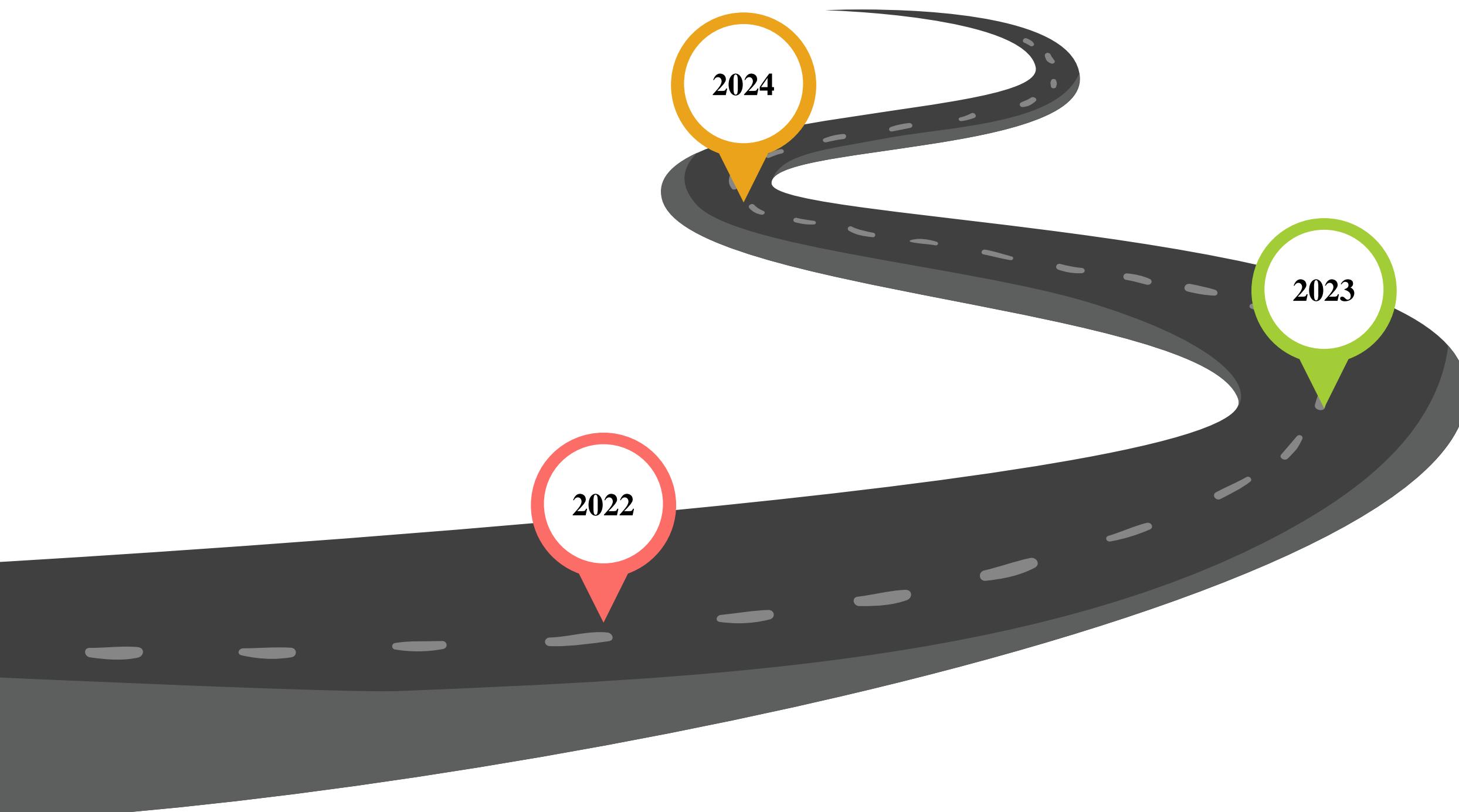


“Diharapkan JDIH dapat menjadi wadah informasi dan dokumentasi Produk Hukum yang dapat diakses Masyarakat dengan mudah, tidak hanya Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota, tetapi juga **Produk Hukum Desa**”

SUMARNO, SE, MM
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Roadmap Pegembangan JDIH Provinsi Jawa Tengah



● 2024

- Pengintegrasian Produk Hukum Desa di Seluruh Provinsi Jawa Tengah
- Optimalisasi Media Sosial sebagai media penginformasian dan pendokumentasian Hukum

● 2023

Pemerkayaan Produk Hukum Provinsi yang terinformasikan (Keputusan Gubernur dan Produk Hukum OPD)

● 2022

- Facelift website JDIH Provinsi Jawa Tengah
- Pengintegrasian Layanan Hukum dalam satu portal JDIH

5.

PENGELOLAAN JDIH DESA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DIGITAL YANG RESPONSIF





Selamat Datang di JDIH Kabupaten Batang

Silahkan cari peraturan yang kamu inginkan di bawah ini :

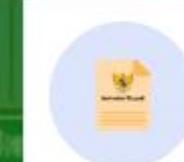
Cari

[Pencarian Detail](#)

Peraturan Bupati
499 Dokumen



Keputusan Bupati
367 Dokumen



Instruksi Bupati
4 Dokumen



Rancangan Peraturan Daerah
13 Dokumen

KELOMPOK BIDANG

Daftar kelompok bidang sesuai keterkaitan dengan produk hukum



Pendidikan



Keuangan



Pariwisata



Kearsipan



Kesehatan

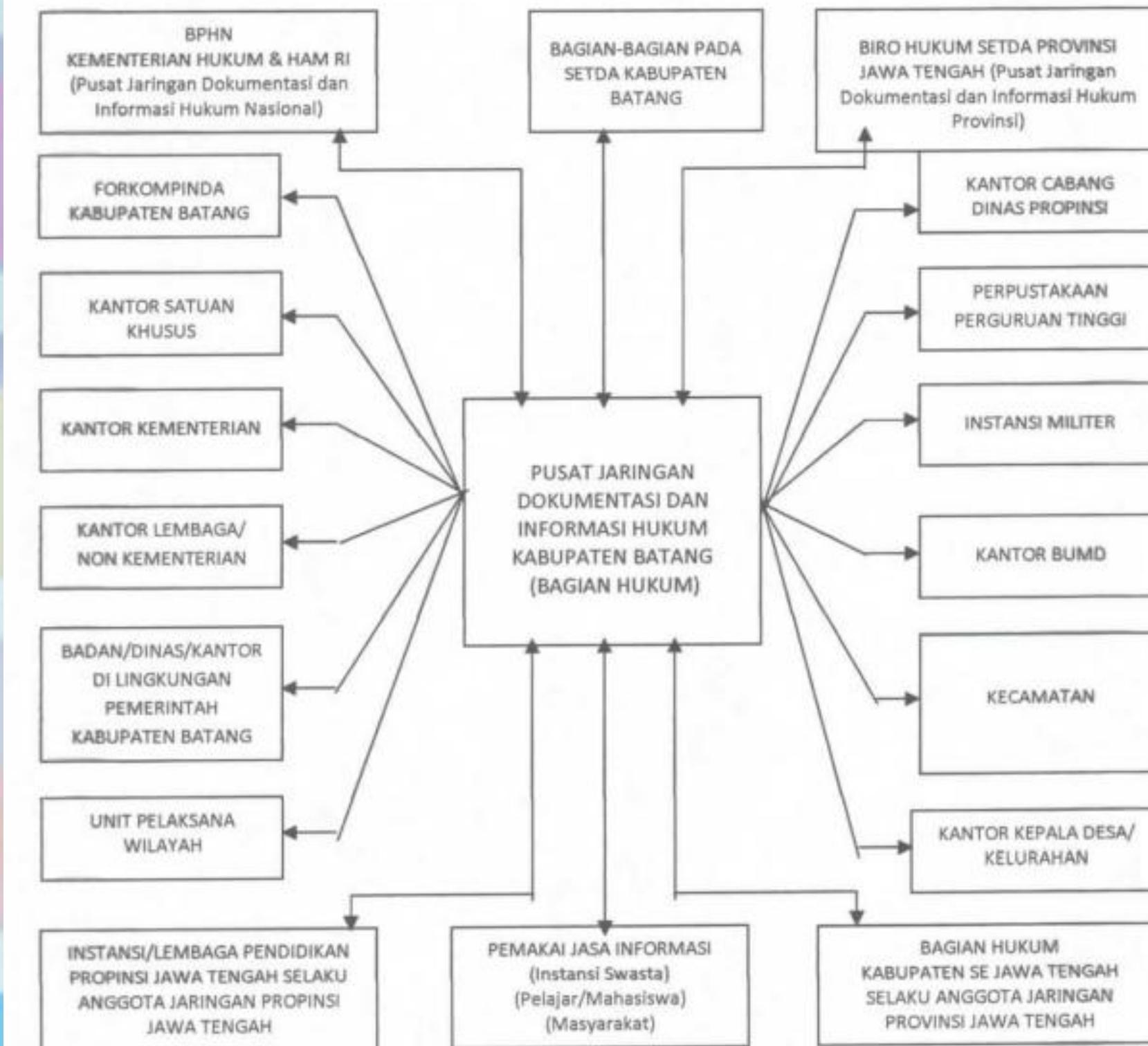


Infrastruktur

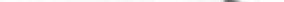
<https://jdih.batangkab.go.id/>



**BAGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BATANG**



KETERANGAN

 : Garis hubungan timbal balik/ kerja sama



TUGAS PUSAT JDIH KAB/KOTA

1

Menyelenggarakan Pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum

2

Membina Sumber Daya Manusia pengelola
Dokumentasi dan Informasi Hukum

3

Menyediakan sistem informasi hukum yang
berbasis teknologi informasi dan diintegrasikan
dengan website JDIHN

4

Menyediakan sarana dan Prasarana
Pelaksanaan Pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum

FUNGSI PUSAT JDIH KAB/KOTA

Pusat Informasi Hukum

Pusat Penyimpanan dan
pengolahan dokumentasi
hukum secara manual dan
digital

Media koordinasi dan
konsultasi dengan anggota
jaringan

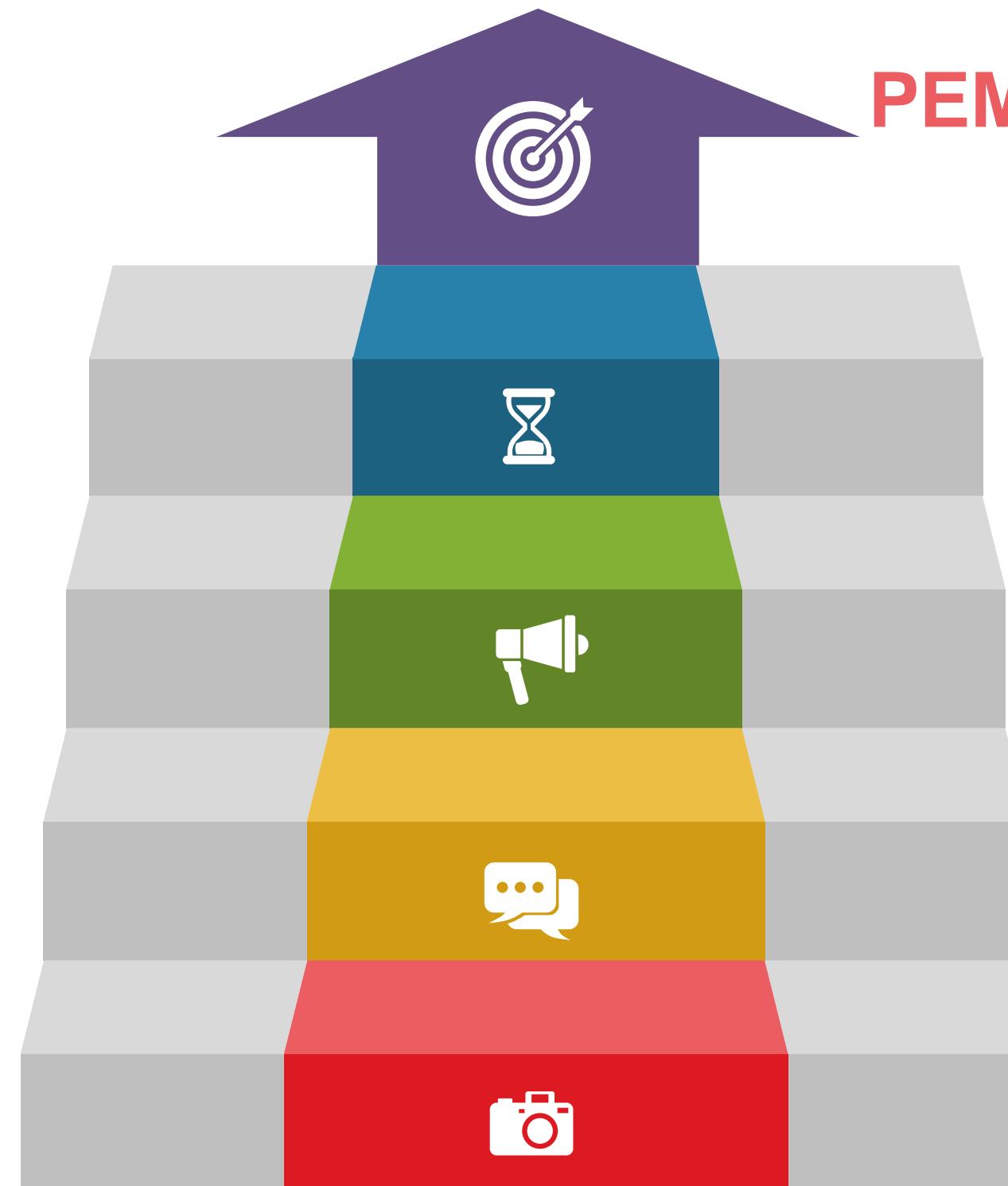
PENGELOLAAN JDIH KABUPATEN BATANG YANG RESPONSIF MELAYANI MASYARAKAT

SINERGITAS PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH

PERAN AKTIF DAN
KOLABORASI ANTARA PUSAT
JDIH DAN ANGGOTA JDIH
& OPD TERKAIT (DISKOMINFO
DAN DINPERMASDES)

KOORDINASI/KONSULTASI

KOORDINASI DAN KONSULTASI
DENGAN PUSAT JDIH PROVINSI DAN
KANWIL HUKUM DAN HAM DALAM
PENGEMBANGAN JDIH.



PEMBINAAN ANGGOTA JDIH

SUMBER DAYA MANUSIA
PEMENUHAN SDM PENGELOLA
JDIH BAIK PADA PUSAT JDIH
MAUPUN ANGGOTA JDIH

SARANA DAN PRASARANA

PEMENUHAN SARANA
DOKUMENTASI DOKUMEN
HUKUM SECARA FISIK DAN
ELEKTRONIK, MELALUI
SINERGITAS DENGAN
DISKOMINFO

PEMBINAAN BAGIAN HUKUM SELAKU PUSAT JDIH KABUPATEN BATANG

VALIDASI DOKUMEN HUKUM

Validasi Produk Hukum yang dihasilkan Desa sebelum diinformasikan kepada masyarakat, untuk mengecek keabsahan dan kesesuaian isi dari Produk Hukum

METADATA DOKUMEN HUKUM

Penyesuaian metadata produk hukum yang diupload kedalam website JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Integrasi JDIH

Hyperlink ke website JDIH Kabupaten Batang



PENGELOLAAN JDIH DI DESA

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Pasal 69:

Desa diberi kewenangan untuk membentuk regulasi meliputi peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa

Pasal 86 :

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Permendagri 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis

Peraturan Di Desa

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

KEWAJIBAN DESA SEBAGAI ANGGOTA JDIH

PEMENUHAN SARPRAS JDIH DESA

Pembuatan Pojok JDIH dan Literasi Desa, website desa

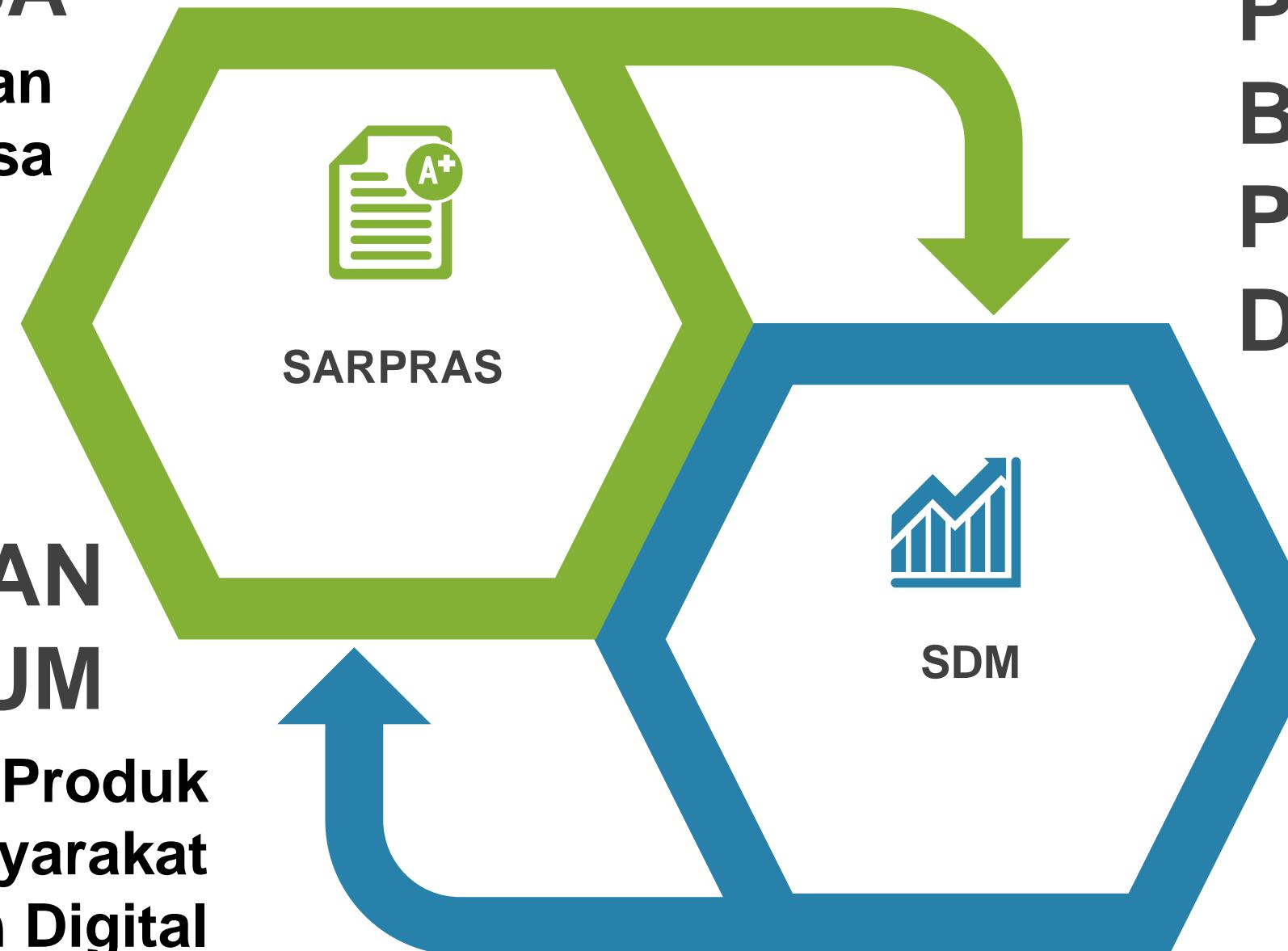
PENYEBARLUASAN DOKUMEN HUKUM

Penyebarluasan Produk Hukum Pada Masyarakat Secara Manual Dan Digital
(Upload Di Website JDIH Dan Pengarsipan Fisik Dokumen)

PENGUMPULAN BAHAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM

Pengumpulan Bahan Dokumen Hukum & Pengelolaan Dokumen Hukum Secara Manual dan Digital

Dilengkapi dengan METADATA



APA YANG HARUS ADA DI JDIH DESA

**PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

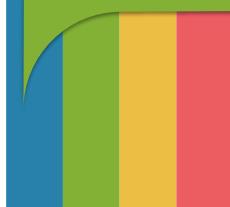
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, peraturan bersama Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, Kerjasama Desa

MONOGRAFI HUKUM

Rancangan Peraturan Desa, buku desa

ARTIKEL HUKUM

Artikel tentang Hukum





085227215652 | balaidesa11@gmail.com

Kabupaten Batang

 Desa Plumpon
Kabupaten Batang

PROFIL DESA ▾ PEMERINTAHAN ▾ LAYANAN INFORMASI ▾ POTENSI DESA PRODUK HUKUM

 / Produk Hukum

Produk Hukum

Title	Penjelasan	Download
KEPUTUSAN KEPALA DESA NO. 783/01P/I/2020 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	PENUNJUKAN OPERATOR SISKEUDES DESA PLUMBON	 Download
KEPUTUSAN KEPALA DESA NO. 5 TAHUN 2020 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA PLUMBON	 Download
PERDES NO 5a TAHUN 2020 PERATURAN DESA	TENTANG PEMENFAATAN ASET DESA	 Download
KEP. KEPALA DESA NO. 1D/2020 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Pengangkatan Ketua RT 2020-2025	 Download
KEP. KEPALA DESA NO. 188.4/1B/I/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Kep. kepala Desa No 188.4/1b/I/2019 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Tahun 2020	 Download
KEP. KEPALA DESA NO. 411.6/06B/III/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Kep. Kepala Desa No. 411.6/06B/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPPH) tahun 2019	 Download
KEP. KEPALA DESA NO. 411.6/06A/III/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Kep. Kepala Desa No. 411.6/06A/III/2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2019	 Download
KEP. KEPALA DESA NO. 411.6/06D/III/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	KEP. Kepala Desa No. 411.6/06D/III/2018 Tentang Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2019	 Download
KEP. KEPALA DESA NO. 11A TAHUN 2020 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	KEP. KEPALA DESA NO. 11A TAHUN 2020 Tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Pencegahan COVID 19 Tahun 2020	 Download
PERKADES NO 6 TAHUN 2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	PERKADES NO. 6 TAHUN 2018 Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2019	 Download
KEPUTUSAN KEPALA DESA NO. 270/2/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Keputusan Kepala Desa No. 270/2/2018 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Pada Pemilu tahun 2019	 Download
KEPUTUSAN KEPALA DESA NO. 910/01B/KEP/2018 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	Keputusan Kepala Desa Plumpon No. 910/01b/KEP/2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan PTTKD Desa Plumpon	 Download



*Ngayemi lan
Nglayani*



@birohukumprovjateng <https://jdih.jatengprov.go.id/>

Matur Nuwun